

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*

Muh. Resa Saputra¹, Haliah², Aini Indrijawati³

muh.resa28@gmail.com¹, haliah_feuh@yahoo.com², ainiindrijawati@gmail.com³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019, dan produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode *partial least square*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*.

Kata Kunci: belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah.

Abstract: This research aims to analyze the effect of capital expenditure on regional economic growth with local revenue as an intervening variable of the regency/city in South Sulawesi Province. The data used in this study are secondary data in the form of realization of regional revenue expenditure budget of the regency/city in South Sulawesi Province in 2015-2019, and gross domestic product of the regency/city in South Sulawesi Province in 2016-2020. The method used is quantitative approach with partial least square method. The result showed that capital expenditure effect on economic growth, while capital expenditure indirectly effect on economic growth with local revenue as an intervening variable.

Keyword: capital expenditure, economic growth, local revenue.

1 Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah secara mandiri dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (revisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 secara rinci dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam mengurus pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga Pengelolaan keuangan daerah diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rostow dan musgrave (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal yang besar mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Dengan peningkatan pengeluaran

pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tersedianya infrastruktur yang baik melalui pembangunan daerah dapat memicu terciptanya efisiensi di berbagai sektor dan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa, 2016). Pertumbuhan kesejahteraan tersebut berhubungan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan yang dikemukakan Halim (2012) dalam pelaksanaan otonomi, melihat besaran kemampuan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah merupakan gambaran kemandirian daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut (Sa'adah, 2019).

Potensi fiskal serta kemandirian daerah yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Selain itu pemberlakuan otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk suatu provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antar daerah yaitu menerapkan aturan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Dengan kebijakan tersebut, keseimbangan akan meningkatkan pertumbuhan daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Adanya kebijakan ini diharapkan terjadi pemerataan pendapatan daerah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit ketimpangan dan kemiskinan di daerah (gap) antara perkembangan ekonomi daerah Jawa dan luar Jawa serta Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kuncoro, 2004).

Berangkat dari uraian diatas, maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta melihat adakah peran pendapatan asli daerah dalam memediasi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Astried Anggraeni (2016) dan Neilis Sa'adah (2019) yaitu penelitian ini tidak menggunakan variabel kinerja keuangan tetapi menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dilakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Intervening*, studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Povinsi Sulawesi Selatan”.

2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang menilai seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening* pada kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi sulawesi selatan. Sampel berupa data laporan realisasi APBD tahun 2015-2019 dan data PDRB tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel *intervening*. Variabel independen yaitu belanja modal. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel *intervening* yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda. *Square Equation Modeling* (SEM) memberikan kemampuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Pada pengujian penelitian ini digunakan *software SmartPLS 3*.

Belanja modal menurut PP Nomor 12 tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal yang digunakan oleh pemerintahan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya meliputi:

- a) Belanja tanah
- b) Belanja peralatan dan mesin
- c) Belanja bangunan dan gedung
- d) Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- e) Belanja aset tetap lainnya
- f) Belanja aset lainnya.

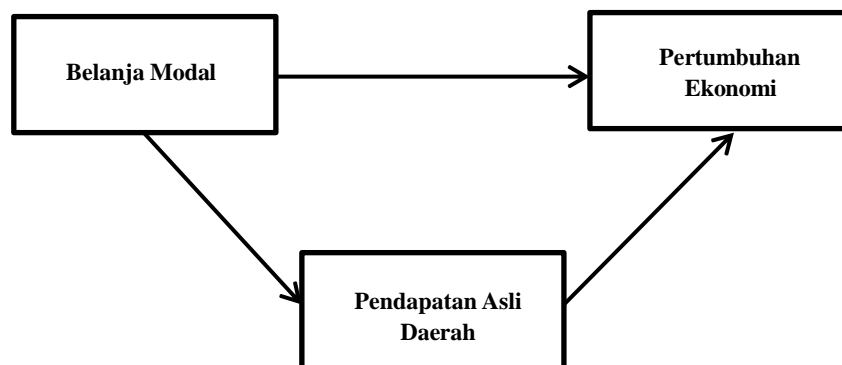
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan perkapita dengan Produk domestik regional bruto (PDRB), salah satu pengukuran yang berdasarkan total nilai barang dan jasa yang ada di daerah atau lokal, pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang ada di daerah, biasanya makin tinggi pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi juga kesejahteraan masyarakat, maka dari itu makin tinggi pertumbuhan ekonomi pemerintah akan memperbaiki peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Adapun indikator variabel yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan pungutan wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun indikator variabel dari pendapatan asli daerah meliputi:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan pemaparan teori yang telah diberikan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil *bootstrapping* menunjukkan bahwa nilai *path coefficient* terbesar ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 21,681. kemudian pengaruh terbesar kedua yaitu pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah sebesar 9,628 dan yang terkecil ditunjukkan oleh pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,033. Sehingga keseluruhan variabel dalam model ini menunjukkan *path coefficient* dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* pada satu variabel independen terhadap

variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

Nilai *R-Square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* sebaliknya jika nilai *R-square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Adapun hasil pengukuran *inner model* dengan PLS adalah sebagai berikut.

R Square pendapatan asli daerah : 0,649

R Square Pertumbuhan Ekonomi : 0,937

Angka hasil *R square* ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel belanja modal memberi nilai sebesar 0,649 yang dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan asli daerah (Z) dapat dijelaskan oleh belanja modal (X) sebesar 64,9%, sedangkan pengaruh variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah memberi nilai sebesar 0,937 yang dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi (Y) dapat dijelaskan oleh belanja modal (X) dan pendapatan asli daerah (Z) sebesar 93,7%. Dari angka tersebut, dapat dikategorikan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan skala moderat.

Penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai *Q-Square*. Nilai *Q-Square* memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination (R-Square)* pada analisis regresi, dimana semakin tinggi *Q-Square*, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai *Q-Square* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q\text{-Square} &= 1 - [(1 - R\text{Square}1) \times (1 - R\text{Square}2)] \\
 &= 1 - [(1 - 0,649) \times (1 - 0,937)] \\
 &= 1 - (0,351 \times 0,063) \\
 &= 1 - 0,022 \\
 &= 0,978
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar 0,978. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 97,8%. Sedangkan sisanya sebesar 2,2% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

Tabel 1 Output Bootstrapping-PLS

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X -> Y	0.780	0.765	0.077	10.069	0
X -> Z	0.805	0.784	0.084	9.628	0
Z -> Y	0.967	0.962	0.045	21.681	0

Adapun data hasil pengujian hipotesis yang ditunjukkan dalam *T Statistic*, yaitu. Pengaruh penerapan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan nilai sampel asli (*original sample*) sebesar 0,780 dan *t-statistic* 10,069 yang menunjukkan bahwa *t-statistic* > *t-table* (tingkat signifikan 5% = 1,96). Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah, menunjukkan nilai sampel asli (*original sample*) sebesar 0,784 dan *t-statistic* 9,628 yang menunjukkan bahwa *t-statistic* > *t-table* (tingkat signifikan 5% = 1,96). Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menunjukkan nilai sampel asli (*original sample*) sebesar 0,967 dan *t-statistic* 21,681 yang menunjukkan bahwa *t-statistic* > *t-table* (tingkat signifikan 5% = 1,96). Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2 Total Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X -> Z -> Y	0.779	0.756	0.100	7.772	0

Terakhir hasil pengujian variabel *intervening* ditunjukkan bahwa, pengaruh tidak langsung dari tabel diatas menunjukkan pendapatan asli daerah dalam memediasi hubungan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah memiliki nilai sampel asli (*original sample*) sebesar 0,779 dan *t-statistic* 7,772. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa *t-statistic* > *t-table* (tingkat signifikanis 5% = 1,96). Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka dapat dijelaskan hasil dan pembahasan pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut.

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa belanja modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah yang berasal dari belanja modal, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Waryanto (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, seperti yang didapatkan oleh Mukarramah, dll (2019) bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena belanja modal terutama yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Penyebaran pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di daerah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebar sampai ke penjuru negeri (Waryanto, 2017). Meskipun koefisien dan signifikansi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini termasuk rendah, hal tersebut justru menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal.

Dalam Waryanto (2017) ditjen anggaran mengemukakan bahwa Pengeluaran investasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran produktif bersifat langsung dan tidak langsung. Pengeluaran investasi produktif yang bersifat langsung seperti pengadaan tanah dan pembelian barang/ peralatan fisik dapat meningkatkan stok barang modal (*capital stock*) secara fisik, dan meningkatkan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang, yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya. Sementara itu, salah satu contoh pengeluaran investasi produktif yang bersifat tidak langsung adalah investasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Investasi di bidang SDM diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan skala hasil produksi dan menciptakan pertumbuhan output yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dari pengeluaran investasi pemerintah tersebut dijelaskan oleh Rostow dan Musgrave (1996) keterkaitannya terhadap tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana sehingga pengeluaran pemerintah untuk investasi dibutuhkan sangat besar. Pada tahap selanjutnya, investasi pemerintah tetap dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan peran investasi swasta yang juga harus ditingkatkan. Pada tahap ini besarnya pengeluaran pemerintah disebabkan karena pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah banyak dan kualitas yang baik akibat dari perkembangan ekonomi pada tahap awal. Kemudian barulah pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah beralih dari penyediaan sarana dan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial. Sehingga untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah daerah harus memfokuskan pengeluaran pada investasi tahap awal dalam hal ini pembangunan daerah untuk memperkuat perkembangan ekonomi pada tahap-tahap selanjutnya.

Investasi untuk pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Adapun penyebab kesenjangan di Sulawesi Selatan tergolong dalam kesenjangan ekonomi dan sosial yaitu adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur

umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Pada gambar 1.1 mengenai perbandingan Realisasi Belanja Modal Daerah Seluruh Indonesia tahun 2018 didapatkan bahwa Sulawesi Selatan berada dibawah rata-rata dan termasuk provinsi yang paling rendah terhadap daerah lain. Sehingga Realisasi belanja modal memerlukan efektivitas dan efisien yang baik agar anggaran belanja modal dapat memberikan pembangunan kuantitas dan kualitas yang baik dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening*

Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening* di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya semakin besar belanja modal yang dikeluarkan akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah yang meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Amrozi (2016) dan Sa'adah (2019) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Serta penelitian yang dilakukan Yunus & Amirullah (2019) dan Gafar (2019) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disebabkan karena peningkatan sarana dan prasarana yang dibangun dari realisasi belanja modal yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan pelayanan sektor publik, pelayanan tersebut akan beradampak pada penerimaan yang didapat pemerintah daerah berupa pendapatan asli daerah. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula sumber dana yang dihasilkan dari daerah tersebut, sehingga memberikan stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonominya akan semakin meningkat (Gafar, 2019).

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas berupa investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Sehingga pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (Nugroho, 2012). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4 Kesimpulan

Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti semakin tinggi alokasi belanja modal untuk pembangunan maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun secara tidak langsung belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*. Hal ini berarti semakin besar belanja modal yang dikeluarkan akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah yang meningkat membuat pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.

5 Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu data penelitian hanya mengambil rentang waktu 5 tahun dan tidak mengambil data tahun terbaru 2020 dan 2021 secara lengkap yang menunjukkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi karena faktor *covid 19*.

Daftar Pustaka

- Amrozi, Akhmad Imam. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. 1(1): 1-12.
- Andirfa, Mulia. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5(3): 30-38.
- Anggraeni, Astried. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gafar, Akbar Abdul. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual) Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mukarramah., Yolanda, Cindy., dan Zulkarnain, Muhammad. 2019. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(2): 105-117.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. 1(2): 1-14.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019. Jakarta.
- Rostow, dan Musgrave. (1996). *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Sa'adah, Neilis. 2019. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta.
- Waryanto, Puput. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 1(2): 35-55.
- Yunus, Said., dan Amirullah. 2019. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(2): 186-193.